

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persediaan merupakan sebuah kegiatan aktiva dalam bentuk barang atau perlengkapan yang bertujuan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, persediaan merupakan peranan penting atau utama dalam sebuah neraca dan memiliki perkiraan nilai yang cukup besar dengan melibatkan modal besar. Sebuah entitas atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha harus memiliki persediaan. Keberadaan persediaan tidak saja dianggap sebagai beban (*liability*) karena merupakan pemborosan, tetapi sekaligus juga dapat dianggap sebagai kekayaan (*asset*) yang dapat dengan cepat dicairkan dalam bentuk uang tunai (*cash*). Sistem pengelolaan persediaan adalah serangkaian kebijakan pengendalian yang digunakan untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga ataupun dikontrol. Apabila jumlah persediaan terlalu besar maka akan mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar, juga menimbulkan resiko kerusakan barang yang lebih besar dan biaya penyimpanan yang tinggi. Namun jika persediaan terlalu sedikit mengakibatkan resiko terjadinya kekurangan persediaan karena barang yang dibutuhkan tidak dapat didatangkan secara mendadak, yang dapat menyebabkan

terhentinya proses produksi, penjualan, hingga kehilangan pelanggan. Salah satu jenis kegiatan usaha yang membutuhkan sebuah persediaan adalah di bidang kesehatan.

Kesehatan merupakan sebuah kebutuhan yang mendasar bagi setiap orang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga dapat terwujud derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Dalam upaya mendukung pembangunan di bidang kesehatan, maka tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan dibutuhkan sebagai upaya penunjang kesehatan masyarakat, salah satunya adalah klinik.

Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara perorangan dengan menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik. Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi menjadi klinik pratama dan klinik utama. Klinik pratama merupakan sebuah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik mendasar baik umum maupun khusus sedangkan klinik utama

merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik secara spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik (Permenkes: 2014). Pada data yang didapatkan dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018, berikut jumlah klinik berdasarkan provinsinya sebagai berikut:

**JUMLAH KLINIK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2018**

No	Provinsi	Jumlah Klinik Utama	Jumlah Klinik Pratama
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	3	99
2	Sumatera Utara	60	959
3	Sumatera Barat	19	221
4	Riau	16	160
5	Jambi	9	137
6	Sumatera Selatan	12	236
7	Bengkulu	6	59
8	Lampung	6	278
9	Kepulauan Bangka Belitung	14	57
10	Kepulauan Riau	13	216
11	DKI Jakarta	207	651
12	Jawa Barat	168	180
13	Jawa Tengah	109	850
14	DI Yogyakarta	22	919
15	Jawa Timur	41	793
16	Banten	28	731
17	Bali	24	152
18	Nusa Tenggara Barat	26	98
19	Nusa Tenggara Timur	4	95
20	Kalimantan Barat	8	91
21	Kalimantan Tengah	14	163
22	Kalimantan Selatan	6	40
23	Kalimantan Timur	6	271
24	Kalimantan Utara	0	1
25	Sulawesi Utara	3	23
26	Sulawesi Tengah	16	50
27	Sulawesi Selatan	67	220
28	Sulawesi Tenggara	0	56
29	Gorontalo	6	2
30	Sulawesi Barat	0	4
31	Maluku	3	17
32	Maluku Utara	0	3
33	Papua Barat	3	52
34	Papua	5	33
	Indonesia	924	7.917

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2019

Tabel I.1 Jumlah Klinik Menurut Provinsi Tahun 2018

Jika dilihat dari tabel I.1, jenis klinik yang memiliki jumlah paling banyak adalah klinik pratama, yang dimana enam provinsi yang memiliki jumlah klinik pratama terbesar adalah provinsi Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan DKI Jakarta.

Dari data diatas maka klinik terdapat dimana saja bahkan tidak sedikit perguruan tinggi yang menyediakan klinik sebagai fasilitas untuk mendukung kebutuhan para masyarakat yang berada di lingkungan kampus khususnya para akademisi begitu juga dengan mahasiswa sebagai fokus utamanya.

Klinik Pratama Universitas Negeri di Jadetabek	
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Klinik Untirta
UIN Syarif Hidayatullah	Klinik Pratama UIN Syarif Hidayatullah
Universitas Negeri Jakarta	Klinik Pratama Pusat Layanan Kesehatan dan Konseling (PLKK) Universitas Negeri Jakarta
Universitas Indonesia	Layanan Konseling Klinik Satelit Makara Universitas Indonesia
UPN Veteran Jakarta	Poliklinik UPN Veteran Jakarta

Data: Diolah oleh Penulis, 2020

Tabel I.2 Klinik Pratama Universitas Negeri di wilayah Jadetabek

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) adalah salah satu universitas negeri yang terletak di wilayah Jakarta yang memiliki klinik dengan jenis pelayanan klinik

pratama yang bernama Klinik Pratama Pusat Layanan Kesehatan dan Konseling (PLKK) Universitas Negeri Jakarta.

Klinik Pratama Pusat Layanan Kesehatan dan Konseling (PLKK) Universitas Negeri Jakarta bertugas untuk memberikan layanan kesehatan bagi Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta, yaitu mahasiswa, dosen, dan karyawan, serta masyarakat umum disekitar lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Pelayanan-pelayanan yang diberikan dari Klinik Pratama Pusat Layanan Kesehatan dan Konseling (PLKK) Universitas Negeri Jakarta diantaranya adalah pelayanan poli umum dan pelayanan poli gigi.

Dengan adanya Klinik Pratama Pusat Layanan Kesehatan dan Konseling (PLKK) Universitas Negeri Jakarta maka pihak tersebut diharuskan memiliki instalasi farmasi. Instalasi farmasi merupakan bagian dari klinik yang bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di klinik (Permenkes: 2014). Menurut UU RI No. 44 Tahun 2009, pelayanan kefarmasian harus dapat memberikan jaminan atas ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau karena instalasi farmasi memiliki peran penting pada klinik dikarenakan hampir keseluruhan pelayanan yang diberikan kepada pasien di klinik memerlukan kesediaan farmasi dan/atau perbekalan kesehatan. Menurut UU RI No.36 Tahun 2009 Pasal 37 ayat 2, pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa obat

esensial dan alat kesehatan dasar tertentu dilaksanakan dengan memperhatikan kemanfaatan, harga, dan faktor yang berkaitan dengan pemerataan.

Pihak instalasi dari farmasi juga harus memiliki tingkat perputaran persediaan obat-obatan yang baik untuk menjaga persediaan obat-obatan dari resiko kehilangan, kerusakan, maupun kadaluwarsa serta memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansinya, dan meningkatkan efisiensi sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan klinik dari segi ekonomi dan biaya operasional daripada klinik. Dilihat dari besarnya kontribusi instalasi farmasi maka pengelolaan obat harus dilakukan dengan cermat dan penuh tanggung jawab yakni agar selalu tersedia setiap saat saat dibutuhkan dalam jumlah cukup dan mutu terjamin untuk mendukung pelayanan yang bermutu.

Jika pihak klinik tidak mengelola persediaan obatnya dengan baik, maka akan berdampak kepada petugas yang kesulitan memenuhi kebutuhan persediaan obat, tidak diketahui dengan pasti obat yang masih tersedia beserta kelayakannya dan tidak diketahui kapan seharusnya melakukan pemesanan pembelian obat. Persediaan obat yang terlalu besar ataupun terlalu sedikit dapat mengakibatkan klinik mengalami kerugian. Kerugian yang dirasakan dapat berupa biaya persediaan obat yang membesar serta terganggunya kelancaran pelayanan kesehatan di sebuah klinik. Sebagai contoh kasus pada fasilitas kesehatan yang penulis dapat dari harian online republika.co.id, terjadi kasus yang menimpa seorang ibu mendapatkan obat yang sudah kadaluwarsa setelah berobat di sebuah

puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut dapat disebabkan karena kurangnya pengelolaan persediaan yang baik dari puskesmas tersebut.

Pada instansi pelayanan kesehatan seperti klinik, persediaan memiliki peranan penting pada kegiatan operasionalnya. Kegiatan dari sebuah klinik tidak akan maksimal jika persediaan obat yang dimiliki tidak lengkap. Persediaan obat merupakan unsur yang sangat penting karena memiliki peran dalam kualitas pelayanan dari suatu klinik, sebab obat memiliki strategi “empat tepat” (tepat diagnosa, tepat dosis, tepat obat, tepat pemberian) kepada pasien agar menjamin pelayanan dan keamanan pasien dalam berobat. Jika persediaan obat tidak ada, hal tersebut dapat merugikan banyak pihak. Kerugian dapat dirasakan dari pihak pasien yang tidak mendapatkan pengobatan secara tepat waktu, tidak hanya itu saja, sebuah kredibilitas klinik dapat menurun sehingga mengakibatkan berpalingan masyarakat ke klinik lainnya dan terjadi sebuah penurunan dari volume kunjungan pasien. Maka dari itu, pengelolaan akuntansi persediaan obat harus digunakan dengan optimal untuk menunjang kelancaran dalam kegiatan operasional klinik.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tugas akhir dengan judul “**Analisis Persediaan Obat Berdasarkan PSAP 05 pada Klinik Pratama Pusat Layanan Kesehatan dan Konseling (PLKK) Universitas Negeri Jakarta**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana perlakuan persediaan obat yang diterapkan Klinik Pratama Pusat Layanan Kesehatan dan Konseling (PLKK) Universitas Negeri Jakarta?
2. Unsur apakah yang menjadi kendala pada pengelolaan persediaan stok obat pada Klinik Pratama Pusat Layanan Kesehatan dan Konseling (PLKK) Universitas Negeri Jakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui perlakuan pada persediaan obat yang diterapkan Klinik Pratama Pusat Layanan Kesehatan dan Konseling (PLKK) Universitas Negeri Jakarta.
 - b. Untuk mengetahui unsur apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan persediaan stok obat pada Klinik Pratama Pusat Layanan Kesehatan dan Konseling (PLKK) Universitas Negeri Jakarta.
2. Manfaat dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagi Penulis:

Sebagai syarat penulis untuk mencapai gelar Ahli Madya jurusan Akuntansi jenjang Diploma tiga (D-III) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

b. Bagi Universitas Negeri Jakarta:

Dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan untuk para mahasiswa maupun akademisi dalam mengembangkan ilmu akuntansi dan menambah kepustakaan di bidang akuntansi serta sebagai masukan teori bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Klinik:

Dengan adanya penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan klinik serta memberikan masukan dan atau informasi dalam perlakuan akuntansi persediaan obat agar lebih baik dalam perlakuan akuntansi persediaan obat pada Klinik Pratama Pusat Layanan dan Konseling (PLKK) Universitas Negeri Jakarta.